

IKHLAS ADAPTASI DEMI DEDIKASI

Penulis: Ruruh Handayani
Foto: J. Fakkar dan
Dok. Pribadi

▶ **MOHAMMAD ISNAENI**
Senior Advisor TaxPrime

Pengalaman dan capaian 38 tahun sebagai fiskus menjadi bekal Isnaeni mendedikasikan kemahirannya di masa purnabakti.

Pajak memang bukan hal yang asing bagi Mohammad Isnaeni, karena ayahnya bertugas sebagai pegawai pajak. Namun, ia tidak pernah bercita-cita menekuninya. Bahkan, setelah lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta pada 1978 silam, pria yang akrab disapa Isnaeni ini mengambil jurusan program studi Teknik Sipil di Universitas Indonesia. Namun, di saat yang bersamaan, sang ayah memintanya untuk meneruskan pendidikan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—kini PKN STAN, supaya bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Isnaeni diterima di kedua kampus itu, dan memutuskan menuruti permintaan ayahanda, karena yakin keputusan itu yang terbaik baginya. Untuk itu, ia mesti berjuang menguasai sejumlah pelajaran yang terbilang baru demi mempertahankan posisinya sebagai mahasiswa selama bersekolah di STAN.

“Kalau teman-teman dari SMEA, mereka sudah tahu tentang hitung dagang atau tata buku. Sedangkan saya perlu menyesuaikan dan butuh waktu relatif panjang. Tapi begitu paham sih relatif mudah, ya,” kata Isnaeni saat berbincang dengan *Majalah Pajak*, Selasa (28/6).

Jadi fiskus

Setelah lulus Diploma III pada 1982, Isnaeni ditempatkan sebagai pemeriksa di Kantor Inspeksi Pajak—saat ini menjadi KPP—di Manado, Sulawesi Utara. Usai dua tahun mengabdikan, ia melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar Diploma IV. Setelahnya, Isnaeni ditugaskan di KPP Penanaman Modal Asing (PMA).

Sejak saat itu, kariernya sebagai fiskus terus menanjak dan dipercaya memegang sejumlah jabatan strategis seperti Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Timur, Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, dan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III—jabatan terakhir yang ia emban hingga purnabakti.

Sejumlah pengalaman menarik pun ia dapatkan selama bertugas menjadi fiskus, salah satunya saat menangani Wajib Pajak Badan yang meminta restitusi yang tidak sesuai dengan kapasitas usahanya.

Isnaeni yang kala itu menjabat sebagai Kepala KPP Besar Dua menuturkan, ada dua perusahaan yang mengklaim restitusi dengan total nilai mencapai Rp 3,6 triliun atau 25 persen dari total klaim restitusi 1 tahun pajak. Kasus itu pun tersiar dengan cepat hingga menyelidikannya melibatkan BPK, PPAK, hingga DPR. Peristiwa ini, sambungnya, sangat menyedot perhatian

masyarakat sampai-sampai harga saham kedua perusahaan tersebut mengalami penurunan.

Pengalaman lain yang menarik baginya adalah kasus dua perusahaan automotif yang menggunakan harga transfer dalam negeri (*domestic transfer pricing*). Sengketa pajak yang akhirnya dimenangkan DJP di Pengadilan Pajak ini merupakan salah satu capaian yang berarti bagi Isnaeni karena diikuti penyesuaian peraturan dan kebijakan terkait *transfer pricing*.

“Waktu itu kami temukan pemanfaatan harga transfer dua perusahaan grup dalam satu negara guna memperkecil pembayaran PPhBM. Menkeu saat itu merasa perlu adanya penjelasan rinci tentang alasan diterapkannya penghitungan kembali harga transfer antara dua perusahaan tersebut. Sekarang, *domestic transfer pricing* sudah diatur melalui PMK yang dikeluarkan di tahun 2019. Tapi saya tidak sempat menerapkannya, karena sudah pensiun,” urai Isnaeni.

Untuk menyeimbangkan tekanan dan tantangan yang dihadapi sebagai otoritas pajak, Isnaeni kerap menjelajahi hutan dan sungai, *snorkeling* di lautan, juga bepergian di waktu liburnya. Ini sering ia lakukan saat ditugaskan di Kalimantan sampai saat ini.

“Saya suka laut dan hutan. Sewaktu ditugaskan di Kalimantan selama tiga tahun, saya sempat keliling Kalimantan Utara, naik perahu menyusuri sungai lalu ke laut mengunjungi pulau-pulau melihat pesut dan terumbu karang, atau menyusuri hutan mencari bekantan. Buat saya itu menarik banget.”

**KONSULTAN PAJAK ADALAH
PROFESI YANG TIDAK AKAN HABIS
DIMAKAN ZAMAN.**

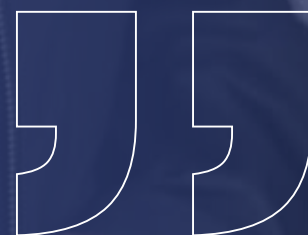




Foto: Dok. Pribadi



Foto: Dok. Pribadi



Foto: Dok. Pribadi

Ikhlaskan diri

Isnaeni telah memasuki masa purnakarya sejak 2018 lalu. Mulanya, ia rehat sejenak untuk menikmati masa tua dan menjalani beberapa hobi yang belum sempat ditunaikan: memelihara ikan dan berkebun. Namun, rupanya usia senja tidak menghentikan semangat Isnaeni untuk kembali berkarya di bidang perpajakan.

Sejak 2019, Isnaeni bergabung sebagai Senior Advisor di firma konsultan pajak TaxPrime. Ia tercatat punya keahlian seputar pemeriksaan pajak, pajak badan, keberatan pajak, dan banding pajak. Sebelum mulai bekerja sebagai konsultan pajak, ia merasa harus mengikhlaskan diri tidak lagi punya kewenangan seperti saat menjadi otoritas pajak.

“Saya rasa orang lain yang sudah pensiun masih tetap sama, ingin tetap mendedikasikan diri di pajak, dan ternyata saya masih dibutuhkan sebagai konsultan pajak. Tapi, bagaimana adaptasinya? Saya harus ikhlas menerima, bahwa dulu punya kewenangan, sekarang tidak,” ucapnya.

Ia pun meyakini, konsultan pajak merupakan profesi yang tidak akan habis dimakan zaman, karena selalu dibutuhkan masyarakat. Apalagi, selama ini pajak dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan.

“Kecenderungan orang kalau bisa menghindari pajak atau dia takut pajak. Pada saat dia dipanggil sama orang pajak, dia butuh bantuan. Kalau yang berani dia akan datang sendiri, tapi mayoritas kayaknya enggak berani,” katanya.

Isnaeni juga merasa, ketertarikan generasi muda terhadap pajak terus meningkat. Artinya, inklusi perpajakan saat ini telah benar-benar merambah ke usia dini. Pajak menjadi topik yang penting ketika pengusaha muda akan membuka usaha, tidak lagi dipikirkan kemudian atau di belakang.

“Sekarang jarang ada yang mau sembunyi. Yang selalu diperbincangkan justru pajak itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Saya pikir itu sudah bentuk kesadaran pajak,” imbuhnya.

Di sisi lain, menjadi mitra di TaxPrime merupakan pilihannya yang tepat. Isnaeni merasa, TaxPrime memiliki budaya kerja

” TERNYATA SAYA MASIH DIBUTUHKAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK. TAPI, BAGAIMANA ADAPTASINYA? SAYA HARUS IKHLAS MENERIMA BAHWA DULU PUNYA KEWENANGAN, SEKARANG TIDAK.



Foto: J. Fakkar

yang sehat, sehingga menumbuhkan budaya kerja positif dan menghasilkan pekerjaan berkualitas, sekaligus bertindak sebagai duta perusahaan.

“Umumnya, sebagian besar perusahaan meremehkan pentingnya memiliki budaya kerja yang positif, dan lebih fokus pada proses perekrutan berdasarkan kompetensi ketimbang kecocokan antara perusahaan dan pegawai. Padahal, reputasi sebuah perusahaan bergantung pada beberapa faktor seperti manfaat yang ditawarkan, prospek karier karyawan, dan budaya perusahaan,” ujarnya.

Setelah menjadi *outsider*, Isnaeni mengapresiasi pemerintah yang membuat kebijakan pajak seiring dengan perkembangan zaman seperti *super deduction tax* untuk keperluan riset. Menurutnya, hal ini yang menunjukkan peran DJP untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa dan negara.

Di samping itu, ia berharap agar pemerintah mempertimbangkan kesetaraan investor lokal dan asing, khususnya pada pengenaan dividen yang berbeda antara *shareholder* lokal yang tidak dikenai pajak dengan investor asing yang dikenakan PPh pasal 26.

“Bila disetarakan, mungkin akan lebih menarik investasi dari luar negeri dan Indonesia akan lebih menikmati dampaknya, baik dari ranah perpajakan maupun peningkatan penyerapan tenaga kerja,” usulnya.

Isnaeni pun menunggu gebrakan DJP setelah diluncurkannya *core tax system* pada 2023 mendatang. Menurutnya, dari sistem yang mumpuni itu, DJP dapat melakukan banyak hal. Salah satunya, membuat Taxpayer Account (T-Account) layaknya aplikasi perbankan yang memuat objek dan kewajiban pajak di sisi debit, sedangkan pembayaran dan pemotongan/pemungutan di sisi kredit.

Dengan T-Account itu, semua data Wajib Pajak yang tercerai-berai di beberapa tempat akan terkumpul jadi satu. Ini akan menguntungkan DJP untuk penggalian potensi penerimaan pajak atau pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

“Kan, DJP ingin tahu seberapa besar asetnya, apa saja aktivitasnya, apa saja sumber penghasilannya. Selama ini, DJP punya banyak data tapi tersebar dan terpisah, sehingga pada saat gali potensi satu WP, serpihan data harus dikumpulkan dulu. Jadi, perlu *effort* dan orang tekad kuat untuk menggali potensi itu,” ucapnya.

Selain itu, Wajib Pajak juga dapat diberi akses untuk melihat pajak yang sudah dibayar, pengajuan permohonan, melihat proses permohonan, dan lain-lain.

“Semua ini akan memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan kepatuhan dan juga akan lebih meringankan beban administrasi WP, karena adanya efisiensi waktu dan biaya, serta transparan,” imbuhnya.

Di akhir perbincangan, Isnaeni berharap agar melalui Hari Pajak, bangsa Indonesia kian menyadari pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional, dan penyelenggaraan negara.

Di sisi lain, Isnaeni memandang pemerintah juga harus terus menyosialisasikan peran pajak kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, seraya memberikan pelayanan terbaik.



Foto: Dok. Pribadi